

**FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENGEMBANGAN
WILAYAH TRANSMIGRASI KELAPA SAWIT DI PERBATASAN
(Kasus UPT Simanggaris dan Sebuku, Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Timur)**

Roby Fauzan dan Luqman Erningpraja

ABSTRAK

Telah dilakukan identifikasi faktor pendukung dan penghambat pengembangan kawasan transmigrasi di kawasan perbatasan Kalimantan – Malaysia dengan studi kasus UPT Simanggaris dan Sebuku di Kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Timur. Pengambilan data dilakukan melalui pengamatan lapangan dan wawancara kepada tokoh kunci yang dibahas secara kualitatif eksploratif. Berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa faktor pendukung di kedua lokasi transmigrasi tersebut adalah adanya industri perikanan yang menopang kegiatan ekonomi setempat serta pembangunan jalan negara. Faktor penghambat antara lain buruknya kondisi keuangan perusahaan bapak angkat, adanya transmigran kutu loncat, kurangnya SDM yang kompeten dari pihak pemerintah Kabupaten serta kurangnya infrastruktur air dan listrik. Secara khusus, faktor pendukung lainnya untuk kawasan Sebuku adalah mudahnya akses dengan ibukota kabupaten Malinau via darat dan ibukota kabupaten Nunukan via air. Faktor pendukung lainnya di kawasan Simanggaris adalah lahan transmigrasi relatif jauh dengan penduduk asli. Faktor penghambat lainnya untuk lokasi Sebuku adalah peredaran bibit palsu dan konflik lahan perusahaan bapak angkat dengan penduduk asli, sedangkan di Simanggaris faktor penghambat lainnya adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi serta frekuensi kapal bersubsidi dari ibukota Kabupaten.

Kata kunci: transmigrasi, pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan – Malaysia

ABSTRACT

This research identifies the push and constraint factors of transmigration area development in the border area between Indonesian Kalimantan and Eastern Malaysian border. The case study takes places in Simanggaris and Sebuku transmigration settlement unit, Nunukan regency, East Kalimantan. This is a qualitative and descriptive research through field survey and key person interview methods. The result shows that the push factors in both location are the presence of legal and illegal wood industry that support local economy and the construction of state road interconnection. The constraint factors are the bad financial performance of partner company, the presence of frequent transmigrants and the lack of electricity and water supply infrastructures. In Sebuku, the other push factor is the easy

Faktor pendukung dan penghambat pengembangan wilayah transmigrasi kelapa sawit di perbatasan (Kasus UPT Simanggaris dan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur)

accessibility to Mensalong, the capital of Malinau regency through road transportation and to Nunukan capital via water. In Simanggaris, the absence of local people settlement surrounding the transmigration settlement unit helps the unit to avoid conflict with indigenous people. For Sebuku, the other constraint factors are the widespread of illegitimate seedlings and the land conflict between the partner company and indigenous people. For Simanggaris, the other constraint factors are the lack of telecommunication and information infrastructures and the lack of subsidized water transport frequency to and from the capital of Nunukan regency.

Keywords: transmigration, Kalimantan – Malaysia border area development

PENDAHULUAN

Pengembangan perkebunan kelapa sawit baik: inti murni, inti plasma, transmigrasi maupun pola-pola lain merupakan pengembangan 'kota skala mini' dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Sejalan dengan itu, pengembangan kelapa sawit rakyat di daerah pengembangan baru harus didukung dengan konsep perencanaan wilayah yang matang dan terpadu, tidak hanya memperhatikan potensi sumberdaya alam dan sosial-ekonomi, tetapi perlu juga memperhatikan aspek perencanaan infrastruktur dan tata lingkungan. Filosofi pengembangan kawasan transmigrasi telah berubah dari pengurangan kepadatan penduduk menjadi pengembangan daerah. Priyono (3) menyatakan bahwa implikasi dari perubahan filosofi ini adalah bahwa pembangunan unit-unit permukiman transmigrasi (UPT) harus didesain untuk tumbuh dan berkembang menjadi kawasan pertumbuhan (*growth centres*). Dalam konteks perkelapasawitan, budidaya kelapa sawit di kawasan transmigrasi harus menjadi *economic generator* yang menggerakkan sektor – sektor lain dalam pembangunan wilayah. Pramono (2003) menyatakan bahwa ada

tiga kegiatan yang melatarbelakangi penyelenggaraan transmigrasi yaitu optimalisasi pemanfaatan ruang, perpindahan penduduk menetap, dan pemberdayaan masyarakat, yang seluruhnya bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan integritas nasional.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi laju perkembangan kawasan transmigrasi, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar adalah keberadaan pasar untuk memasarkan produk, jalur pemasaran produk dari kawasan transmigrasi ke kecamatan atau kabupaten, dan akses ke fasilitas pengolahan, ketersediaan kios untuk sarana produksi yang murah. Faktor dalam adalah SDM transmigran, meliputi: tingkat pendidikan, penguasaan teknologi, kemampuan usaha transmigran, kemampuan transmigran bekerjasama dengan para mitra dan adanya komoditas unggulan bernilai ekonomis tinggi (4).

Kalahnya Indonesia dari Malaysia di arbitrase internasional dalam kasus pulau Sipadan – Ligitan menimbulkan kesadaran pemerintah untuk memberdayakan kawasan perbatasan. Salah satu upaya pemberdayaan kawasan perbatasan adalah dengan pembangunan perkebunan

di perbatasan Indonesia–Malaysia, antara lain dengan program transmigrasi. PPKS dan LRPI juga terlibat dalam pengkajian pemanfaatan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia untuk pengembangan kawasan perkebunan. Pada tulisan ini akan dikaji faktor pendukung dan penghambat pengembangan kawasan transmigrasi berbasis kelapa sawit yang telah ada di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia, salah satunya di Kabupaten Nunukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 23 – 26 Agustus 2006 dan 21 – 28 November 2006 dengan lokasi di UPT Simanggaris, Kecamatan Nunukan, dan UPT Sebuku, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Kabupaten Nunukan terletak di Kalimantan Timur, pada $115^{\circ}33' - 118^{\circ}3''$ BT dan $3^{\circ}15'00'' - 4^{\circ}24'55''$ LU (1). Wilayah Utara Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah – Malaysia, sebelah Timur dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, dan sebelah Barat dengan Negara Bagian Serawak–Malaysia. Secara administratif Kabupaten Nunukan terdiri dari tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Lumbis, Sembakung, Nunukan, Sebuku dan Sebatik.

Tipe penelitian ini bersifat kualitatif eksploratif dengan pengumpulan data sekunder dan primer. Data sekunder berupa studi literatur untuk mengkaji literatur – literatur yang berkaitan dengan

penelitian ini. Data primer berupa wawancara tokoh – tokoh kunci (Kepala UPT SP 1 Simanggaris, Kepala UPT SP3 Sebuku, Manager Kebun PT. Pohon Emas Lestari, seorang staf Disnakertrans Kab. Nunukan, seorang staf Dishutbun Kab. Nunukan, dua orang staf Bappeda Kab. Nunukan, empat orang karyawan pelaksana perusahaan perkebunan di Simanggaris serta masing–masing empat orang warga transmigran di Sebuku dan Simanggaris) untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tahapan awal penelitian adalah pengumpulan data sekunder dan wawancara awal. Selanjutnya dilakukan observasi langsung dan wawancara secara lebih mendalam. Pengolahan data dilakukan dengan matriks analisis partisipatif. Matriks analisis partisipatif diperoleh melalui hasil survey dan diskusi di lapangan dengan pihak–pihak terkait atau keterlibatan peneliti (5). Dengan demikian, dapat dilihat aspek kepentingan, kekhawatiran, konflik, potensi, dan kelemahan dari setiap pihak sehingga diperoleh gambaran mengenai faktor–faktor pendukung dan penghambat pengembangan kawasan transmigrasi di kedua lokasi tersebut.

HASIL PENELITIAN

Hasil wawancara dan pengamatan lapangan dianalisis berdasarkan kepentingan, kekhawatiran, konflik, potensi dan kelemahan masing – masing pihak secara deskriptif. Secara ringkas, matriks analisis partisipatif dapat dilihat pada Tabel 1.

Faktor pendukung dan penghambat pengembangan wilayah transmigrasi kelapa sawit di perbatasan (Kasus UPT Simanggaris dan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur)

Tabel 1. Matriks Analisis Partisipasi UPT Sebuku dan Simanggaris, Kabupaten Nunukan

No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi
A. 1	SEBUKU Petani Transmigran	Kesejahteraan melalui hasil produksi TBS	Ketidakpastian keberhasilan program transmigrasi berbasis kelapa sawit	Konflik lahan antara perusahaan Bapak angkat dengan penduduk asli	Infrastruktur jalan dan jembatan baik. Investor baru (FELDA) kuat secara finansial. Bertahannya ekonomi UPT setempat ditopang perusahaan kayu setempat maupun penebang kayu tidak resmi	Hambatan penjualan TBS. Tanaman terlantar di Sebuku terutama eks UPT I (Tahun 1996) Pindah tangan kepemilikan kapling transmigrasi kepada pendatang.	Bertahan atau bekerja di bidang perikanan atau perdagangan

No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi
2	Pengusaha Kelapa Sawit Bapak Angkat*)	Reorganisasi sesudah <i>takeover</i> dari investor lama PT. Karang Joang Hijau Lestari	Konflik lahan rehabilitasi lahan plasma	Pemeliharaan tanaman dengan petani plasma	Bertahannya ekonomi UPT setempat ditopang usaha perkeleyuan resmi maupun tidak resmi	Kondisi tanaman plasma dan inti yang kurang pemeliharaan	Program rehabilitasi tanaman inti dan plasma
3	Karyawan pelaksana perkebunan kelapa sawit*)	Kepastian kesejahteraan	Reorganisasi lanjutan oleh investor baru	Masalah PHK	Investor baru kuat secara finansial	Posisi tawar rendah	Bertahan atau bekerja di bidang perkeleyuan atau perdagangan
4	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Keberhasilan program transmigrasi berbasis perkebunan kelapa sawit	Keterhambatan program akibat kurangnya pemeliharaan tanaman. Peredaran bibit palsu	-	Komitmen kuat melalui penyuluhan dan pembinaan.	SDM kompeten terbatas Transmigran kutu loncat	Sasaran program transmigrasi terhambat
5	Pemerintah Kabupaten secara umum*)	Keberhasilan program transmigrasi berbasis perkebunan kelapa sawit	Keterhambatan program akibat buruknya kondisi keuangan investor	-	Komitmen kuat melalui penyuluhan dan pembinaan.	SDM kompeten terbatas	Sasaran program transmigrasi terhambat

Faktor pendukung dan penghambat pengembangan wilayah transmigrasi kelapa sawit di perbatasan (Kasus UPT Simanggaris dan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur)

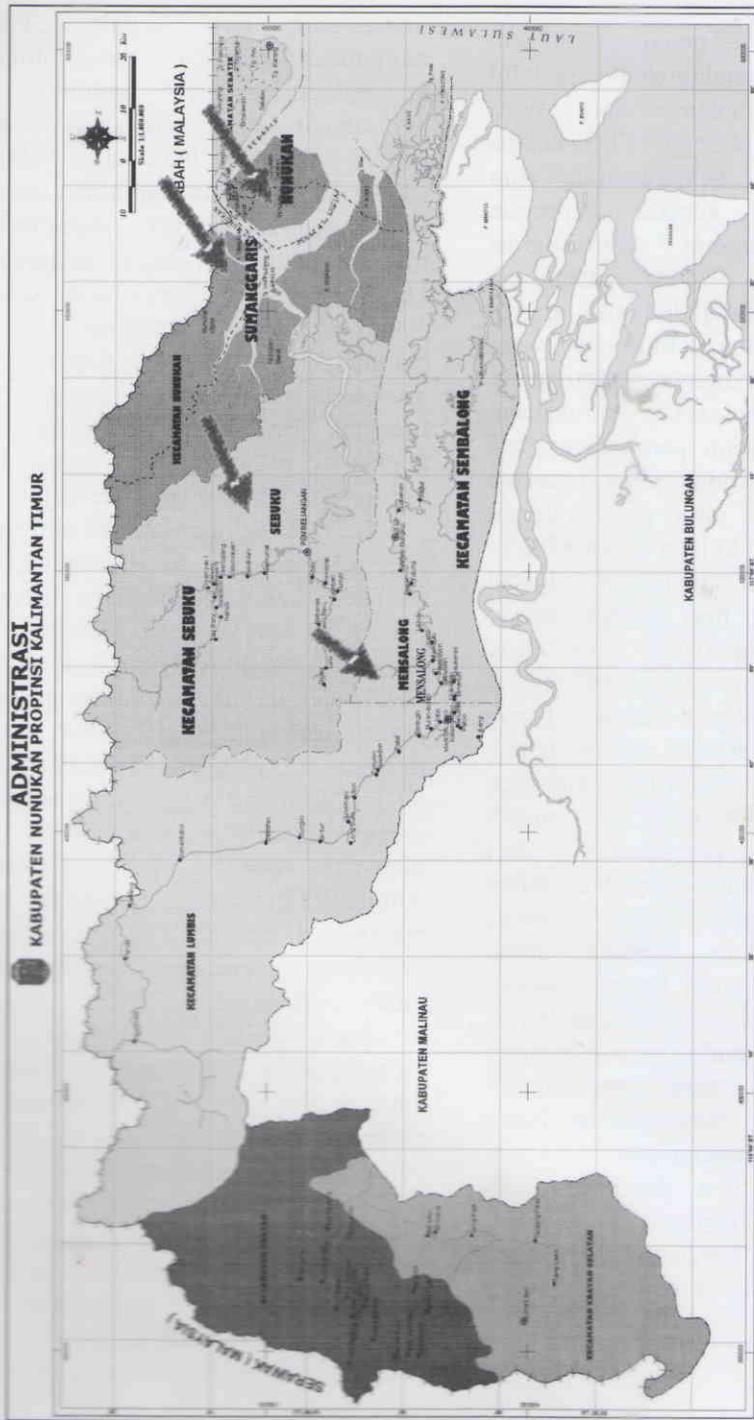
No	Kelompok	Kepentingan	Kekawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Keberhasilan program transmigrasi berbasis perkebunan kelapa sawit	Keterhambatan program akibat kurangnya pemeliharaan tanaman plasma. Ada sedikit peredaran bibit palsu.	-	Komitmen kuat melalui penyuluhan dan pembinaan.	Transmigran kutu loncat	Sasaran program transmigrasi terhambat
B. 1	SIMANGGARIS Petani Transmigran	Kesejahteraan melalui hasil produksi TBS	Kepastian keberhasilan program transmigrasi berbasis kelapa sawit. Kemampuan finansial perusahaan Bapak angkat (PT.PEL)	-	Daerah sekitar bebas dari pemukiman penduduk asli sehingga konflik lahan minimal. Penduduk transmigran heterogen.	Infrastruktur jalan di daerah transmigrasi belum baik. Kondisi keuangan perusahaan bapak angkat yang kurang baik. (PT..PEL).	Progres realisasi tanam dan pemeliharaan kebun plasma terkendala kondisi finansial perusahaan bapak angkat.

No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi
2	Pengusaha Kelapa Sawit Bapak Angkat	Kemajuan usaha Perbaikan kondisi finansial perusahaan	Kondisi finansial perusahaan bapak angkat yang belum baik.	-	Bertahannya ekonomi UPT setempat ditopang perusahaan kayu setempat maupun penebang kayu' tidak resmi'.	Kondisi finansial perusahaan yang belum baik.	Kemajuan penanaman plasma terkendala kondisi perusahaan bapak angkat yang belum baik.
3	Karyawan pelaksana perkebunan kelapa sawit	Kepastian kesejahteraan	Gaji sering terlambat	Masalah gaji	Bertahannya ekonomi UPT setempat membuka lapangan pekerjaan baru	Posisi tawar rendah	Bertahan atau bekerja di bidang perikanan atau perdagangan
4	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Keberhasilan program transmigrasi berbasis perkebunan kelapa sawit	Keterhambatan program akibat buruknya kondisi keuangan investor	-	Komitmen kuat melalui penyuluhan dan pembinaan	Transmigran kutu loncat SDM kurang	Sasaran program transmigrasi terhambat

Faktor pendukung dan penghambat pengembangan wilayah transmigrasi kelapa sawit di perbatasan (Kasus UPT Simanggaris dan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur)

No	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi
5	Pemerintah Kabupaten secara umum*)	Keberhasilan program transmigrasi berbasis perkebunan kelapa sawit	Keterhambatan program akibat buruknya kondisi keuangan investor. Kekecewaan petani akibat terhambatnya beberapa program pemerintah.	-	Komitmen kuat melalui penyuluhan dan pembinaan	SDM kompeten terbatas	Sasaran program transmigrasi terhambat
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Keberhasilan program transmigrasi berbasis perkebunan kelapa sawit	Keterhambatan program akibat buruknya kondisi keuangan investor	-	Komitmen kuat melalui penyuluhan dan pembinaan	Transmigran kutu loncat	Sasaran program transmigrasi terhambat.

*) berdasarkan keterangan pihak – pihak lain/terkait



Lokasi Penelitian

- Mensalong - Kec. Lumbes
- Sebuku - Kec. Sebuku
- Sumanggaris - Kec. Nunukan
- Nunukan - Kec. Nunukan

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Nunukan dan Lokasi Penelitian

Sebuku

Kepentingan petani adalah peningkatan kesejahteraan melalui penerimaan pendapatan dari hasil produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, sedangkan kekhawatiran para petani bermuara kepada kepastian keberhasilan program transmigrasi berbasis kelapa sawit mengingat perusahaan yang menjadi bapak angkat mengalami kesulitan finansial yang mengakibatkan kurangnya pemeliharaan dan pemupukan tanaman perusahaan bapak angkat maupun pembinaan pada petani sehingga produktivitas tanaman terhambat, begitu juga pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS). Akibatnya, petani penduduk lokasi transmigrasi tidak bisa mengharapkan hasil dari penjualan panen TBS untuk areal tanaman menghasilkan (TM) sebagai penghasilan utama (yang sebelumnya dirawat dan dibina bapak angkat) sehingga mayoritas penduduk lokasi transmigrasi masih menggantungkan penghasilan dari 'industri perkayuan'. Sebagian lahan petani juga terlantar (tidak dirawat) sehingga diperlukan bantuan untuk rehabilitasi tanaman kelapa sawit. Konflik lahan antara perusahaan bapak angkat dengan penduduk asli di Sebuku mengkhawatirkan para transmigran karena berpotensi merambat ke lahan transmigrasi. Pembangunan SP4 di Sebuku khusus para penduduk asli terbukti mampu mengurangi konflik yang terjadi antara penduduk asli dengan perusahaan perkebunan dan transmigran pendatang.

Berdasarkan keterangan petani/transmigran dan Kepala UPT 3, reorganisasi pasca pengambilalihan kepemilikan dari pemilik lama perusahaan bapak angkat (PT. KHL) kepada investor baru dari Malaysia merupakan prioritas utama investor baru. Para petani sendiri mengharapkan investor baru akan segera memperbaiki kondisi finansial perusahaan sehingga pemeliharaan tanaman serta pembangunan pabrik dapat segera dilaksanakan sehingga petani dapat menjual TBS kepada perusahaan bapak angkat dan pembinaan petani dari perusahaan bapak angkat berlanjut.

Dari keterangan petani/transmigran dan Kepala UPT 3 di Sebuku, yang menjadi kepentingan para karyawan pelaksana perkebunan kelapa sawit adalah perbaikan kesejahteraan. Kekhawatiran para karyawan pelaksana perkebunan kelapa sawit adalah reorganisasi setelah pengambilalihan PT. KHL oleh investor baru yang berpotensi menimbulkan masalah PHK dan eksesnya berupa konflik vertikal. Alternatif bagi para karyawan adalah bertahan bekerja di perusahaan perkebunan, berdagang, atau bekerja di bidang perkayuan.

Dari sisi Dishutbun serta Disnakertrans Kabupaten Nunukan, kepentingan utama adalah keberhasilan program transmigrasi berbasis perkebunan kelapa sawit. Kedua instansi ini mengkhawatirkan keterlambatan program akibat kurangnya pemeliharaan tanaman plasma, masalah peredaran bibit palsu, dan adanya transmigran kutu loncat. Kedua instansi ini mengharapkan Pemkab lebih selektif dalam memberikan

izin bagi perkebunan kelapa sawit, mencakup adanya jaminan finansial dalam pengembangan plasma untuk rakyat atau transmigran. Pemakaian bibit palsu berpotensi merugikan petani yang menambah lahan untuk ditanami kelapa sawit karena potensi produksi bibit palsu kelapa sawit lebih rendah dari bibit unggul bersertifikat. Disnakertrans mengharapkan adanya pendataan transmigran secara nasional untuk mengurangi peluang transmigran keliling untuk ikut program transmigrasi secara berulang – ulang. Dishutbun mengalami kendala dalam pembinaan dan penyuluhan berkaitan dengan kurangnya SDM, mengakibatkan kurangnya intensitas dan kualitas pengawasan program. Kedua instansi memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan program transmigrasi kelapa sawit di lapangan terlihat dari berbagai kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan transmigran seperti pembuatan kolam ikan, pekerjaan – pekerjaan padat karya dan berbagai kegiatan penyuluhan dan pembinaan.

Berdasarkan keterangan dari staf Dishutbun, Disnakertrans serta Bappeda Kab. Nunukan, secara umum kepentingan, kekhawatiran, potensi dan kelemahan Pemkab Kabupaten Nunukan di Sebuku juga sama dengan Dishutbun dan Disnakertrans.

Simanggaris

Di Simanggaris, kepentingan utama para petani relatif sama dengan Sebuku. Bekerja di industri perkebunan kelapa sawit dan perusahaan perkebunan kelapa sawit sekitar masih merupakan gantungan

hidup sebagian besar transmigran, di samping menjadi tukang ojek atau pedagang. Konflik lahan di Simanggaris tidak terjadi karena lokasi transmigrasi maupun perusahaan bapak angkat tidak berdampingan dengan pemukiman penduduk asli.

Perusahaan bapak angkat (PT. SEL) mengalami kendala finansial yang mengakibatkan pemeliharaan TBM lahan plasma milik transmigran tidak dilaksanakan sesuai standar oleh perusahaan bapak angkat dan kelanjutan penanaman lahan plasma tersendat.

Keterlambatan pembayaran gaji menjadi keluhan para karyawan dan berpotensi menimbulkan konflik dengan perusahaan. Para karyawan menggantungkan harapan pada lancarnya industri kayu setempat yang menggerakkan roda ekonomi lokal sehingga mereka dapat menggantungkan diri dari penghasilan tambahan sebagai pedagang ataupun pekerja kayu.

Kepentingan, potensi, dan kelemahan Dishutbun serta Disnakertrans Kabupaten Nunukan di Simanggaris relatif sama dengan di Sebuku, kecuali peredaran bibit palsu yang belum mencapai Simanggaris. Kedua instansi ini mengkhawatirkan keterlambatan program akibat kondisi keuangan perusahaan bapak angkat yang buruk sehingga menghambat kelanjutan penanaman lahan plasma. Hal tersebut juga menjadi kekhawatiran Pemkab Kabupaten Nunukan di Simanggaris.

Infrastruktur

Penulis juga mengamati aspek infrastruktur di sekitar UPT Sebuku dan

Simanggaris. Dari aspek infrastruktur air bersih, masyarakat Sebuku masih bergantung pada sumur sedangkan masyarakat Simanggaris masih bergantung pada pasokan tadah hujan. Pemerintah kabupaten diharapkan menyediakan sistem penyediaan air secara terpusat di masing – masing lokasi transmigrasi untuk menjamin aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas penyediaan air bersih. Penyediaan prasarana air bersih yang memenuhi syarat kesehatan dan kuantitas serta kontinuitas suplai akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan transmigran. Kondisi sanitasi di Sebuku sudah cukup baik, sedangkan di Simanggaris perlu diperbaiki dengan penyediaan WC di sejumlah perumahan transmigran. Kondisi infrastruktur telekomunikasi dan informasi di Sebuku cukup baik, dilihat dari tersedianya jaringan seluler Telkomsel, telepon tetap dan pos, sedangkan di Simanggaris jaringan seluler Telkomsel kurang dapat ditangkap dengan jelas, tidak tersedia kantor pos dan telepon tetap. Pasokan energi listrik di kedua wilayah masih bergantung pada genset rumahan, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi, sedangkan fasilitas sekolah umum sudah tersedia sampai tingkat SMP negeri di Sebuku dan SD Negeri di Simanggaris serta fasilitas pelayanan kesehatan berupa Puskesmas juga telah tersedia di kedua lokasi tersebut. Peningkatan pelayanan Puskesmas mencakup penduduk asli, terutama di Sebuku yang lokasi transmigrasi dekat dengan pemukiman penduduk asli. Hal

ini dilakukan untuk mengurangi potensi konflik yang akan timbul.

Kondisi jalan di Sebuku sangat baik, dan pembangunan jalan negara dan provinsi cukup melancarkan kegiatan ekonomi setempat, meningkatkan harga tanah dan berpotensi memajukan wilayah setempat sehingga penulis memprediksikan bahwa Sebuku akan berkembang menjadi kota kecil yang maju di kawasan perbatasan Kalimantan Timur – Sabah. Mudahnya akses ke Mensalong via darat, ibukota kabupaten Malinau, dan pulau Nunukan via air, turut menggairahkan aktivitas ekonomi di Sebuku, ditunjang perbaikan infrastruktur melalui proyek jalan negara trans Kalimantan di daerah perbatasan Kalimantan Timur – Sabah. Proyek pembangunan jembatan juga intensif dilaksanakan, seperti terlihat pada gambar 2.

Di Simanggaris, jalan lokal masih memanfaatkan jalan eks perambahan kayu maupun jalan yang dibangun perusahaan perkayuan resmi. Kondisi transportasi darat agak terkendala dengan sifat tanah lunak ekspansif di Simanggaris. Pembangunan jalan negara, selain memudahkan mobilitas orang, barang dan jasa (termasuk pengangkutan TBS dan CPO), memudahkan pengawasan kawasan perbatasan dari aspek pertahanan dan keamanan. Transportasi air melalui kapal bersubsidi di Simanggaris cukup menolong untuk laju mobilitas penduduk dan barang dari dan ke ibukota Kabupaten. Kapal bersubsidi ini berpotensi mengurangi biaya hidup transmigran melalui pengurangan biaya transportasi sehingga penghematan uang transmigran dapat



Gambar 2. Proyek Pembangunan Jembatan di Ruas Simanggaris - Sebuku - Mensalong

dialokasikan bagi kebutuhan lain yang lebih penting. Namun, frekuensi kapal bersubsidi masih kurang, hanya dua hari sekali sehingga rakyat masih bergantung pada speedboat dan sampan mesin yang berbiaya tinggi.

PEMBAHASAN

Dari uraian di atas, ternyata faktor pendukung pengembangan transmigrasi kelapa sawit di kedua lokasi transmigrasi tersebut adalah adanya industri perkebunan yang menopang kegiatan

ekonomi setempat serta pembangunan jalan negara yang berpotensi meningkatkan mobilitas orang, barang, dan jasa sehingga berpengaruh terhadap perkembangan wilayah dan ekonomi setempat. Secara khusus, faktor pendukung lainnya untuk kawasan Sebuku adalah mudahnya akses dengan ibukota kabupaten Malinau via darat dan ibukota kabupaten Nunukan via air sehingga mobilitas air, barang dan jasa cukup tinggi. Untuk Simanggaris, faktor pendukung lainnya adalah lahan transmigrasi relatif jauh dan tidak berdampingan dengan penduduk asli sehingga potensi konflik lahan dapat diminimalkan.

Faktor penghambat antara lain buruknya kondisi keuangan perusahaan bapak angkat, adanya transmigran kutu loncat, kurangnya SDM yang kompeten dari pihak pemerintah Kabupaten dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, serta kurangnya infrastruktur listrik dan air. Secara khusus, faktor penghambat lainnya untuk lokasi Sebuku adalah peredaran bibit palsu dan konflik lahan perusahaan bapak angkat dengan penduduk asli. Untuk lokasi di Simanggaris, faktor penghambat lainnya adalah infrastruktur telekomunikasi dan informasi serta kurangnya frekuensi kapal bersubsidi dari ibukota Kabupaten.

Kuatnya sektor perkebunan sebagai penggerak ekonomi lokal cukup mengkhawatirkan, terutama jika dikaitkan dengan rencana pengembangan kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia. Lemahnya kondisi finansial perusahaan perkebunan yang menjadi bapak angkat program transmigrasi/plasma menjadi akar permasalahan. Hal

ini diperlemah lagi dengan lemahnya perencanaan pengembangan transmigrasi berbasis kelapa sawit. Sektor perkebunan kelapa sawit belum dapat menggantikan peran industri perkayuan selama ini. Pengembangan kawasan perkebunan sebagai basis ekonomi sepanjang perbatasan Kalimantan – Serawak – Sabah memerlukan perencanaan yang matang mulai dari infrastruktur seperti jalan, jembatan, air, sanitasi dan listrik sampai seleksi investor yang ketat dari aspek kemampuan finansial. Sektor perkebunan belum berperan aktif menggantikan sektor perkayuan dan diperlukan langkah untuk mengantisipasi ketergantungan akal hal ini. Rencana pemerintah membuka 180.000 hektar untuk perkebunan di kawasan sepanjang perbatasan Kalimantan – Malaysia Timur mulai dilaksanakan. Dengan demikian, tekanan dan kemungkinan dampak lingkungan akibat praktik *illegal logging* dengan alasan menyambung hidup para transmigran akan berkurang sehingga tiga hal sekaligus yang dapat dicapai pemerintah, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan kawasan perbatasan serta pengurangan tekanan terhadap lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor pendukung pengembangan transmigrasi kelapa sawit di kedua lokasi transmigrasi adalah adanya industri perkayuan serta pembangunan jalan negara. Faktor penghambat yaitu buruknya kondisi keuangan perusahaan bapak angkat, adanya transmigran kutu loncat, kurangnya SDM kompeten dari

pihak pemerintah Kabupaten serta kurangnya infrastruktur seperti listrik dan air.

Secara khusus, faktor pendukung lainnya untuk kawasan Sebuku adalah mudahnya akses laut ke ibukota Kabupaten Nunukan dan akses darat ke ibukota kabupaten Malinau. Untuk Simanggaris, faktor pendukung lainnya adalah lahan transmigrasi relatif jauh dengan penduduk asli.. Faktor penghambat lainnya untuk lokasi Sebuku adalah peredaran bibit palsu dan konflik lahan antara perusahaan bapak angkat dengan penduduk asli. Di Simanggaris, faktor penghambat lainnya adalah kurangnya ketersediaan infastruktur telekomunikasi dan informasi serta frekuensi kapal bersubsidi dari ibukota Kabupaten.

Perencanaan pola transmigrasi perlu direncanakan secara matang, baik dari aspek seleksi transmigran, investor dan perencanaan infrastruktur sehingga sektor perkebunan kelapa sawit dapat menjadi penggerak ekonomi kawasan dan mengurangi praktik industri perkayuan ilegal. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengembangan kawasan perbatasan untuk alasan pertahanan dan keamanan serta pengurangan tekanan terhadap lingkungan dapat dicapai. Pembuatan *database* transmigran secara nasional (sensus transmigran) diperlukan untuk memudahkan pengawasan dan pendataan oknum – oknum transmigran keliling. Dalam seleksi dan pemberian investor, diperlukan pencantuman persyaratan dan jaminan kemampuan finansial dalam pembangunan, pembinaan dan penataan proyek plasma dalam rangka penanaman

modal di perkebunan kelapa sawit, khususnya yang melibatkan program kemitraan dengan petani. Selain itu, pemilihan lokasi kawasan transmigrasi sebaiknya berjauhan dengan lokasi pemukiman penduduk asli untuk menghindari konflik lahan, perlu diintensifkan keterlibatan penduduk asli dalam program budidaya kelapa sawit untuk mengurangi potensi konflik antara penduduk asli dengan pendatang atau penduduk asli dengan perusahaan perkebunan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dishutbun dan Disnakertrans Kabupaten Nunukan atas pelaksanaan penelitian ini. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala UPT 1 Simanggaris, UPT 3 Sebuku, Pemkab Kabupaten Nunukan, dan semua pihak terkait atas terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. BADAN PUSAT STATISTIK. 2005. Nunukan Dalam Angka 2004.
2. PRAMONO, D. S. 2003. Kebijakan Penyelenggaraan Transmigrasi Di Era Otonomi Daerah. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta. www.depnakertrans.go.id (Januari 2007)
3. PRIYONO. *et al* 2001. Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi Pola Transmigrasi Umum Tanaman Pangan dan Lahan Kering dan Basah. Puslitbangtrans, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta. www.depnakertrans.go.id (Januari 2007)
4. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI. 2002. Proseding Seminar Arah Kebijakan Transmigrasi 2004 – 2009. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta. www.depnakertrans.go.id (Januari 2007)
5. RIYADI dan BRATAKUSUMAH. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Mewujudkan Otonomi Daerah*. Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.